

Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan

Author:
Henry Aspan¹

Affiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi¹

Corresponding email
henryaspan@yahoo.com



*This is an Creative Commons License This work is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar Belakang :

Perlindungan lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya.

Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Hasil : Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga.

Kesimpulan : Terdapat kebutuhan akan standarisasi prosedur dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Upaya optimalisasi pelayanan hukum juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang mudah terhadap proses hukum yang kompleks.

Kata kunci: pelayanan, prosedur dan penyelesaian perkara keluarga

Pendahuluan

Perlindungan lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak di tengah ancaman perubahan iklim, polusi, dan degradasi ekosistem. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungannya. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan program perlindungan lingkungan, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Salah satu faktor kunci yang sering terabaikan dalam upaya perlindungan lingkungan adalah peran aktif masyarakat. Masyarakat, sebagai pengguna langsung dan penerima manfaat dari lingkungan, memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian. Namun, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih relatif rendah. Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman: Banyak anggota masyarakat masih belum memahami sepenuhnya dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam.
2. Rendahnya kesadaran: Meskipun sebagian masyarakat mungkin memahami isu lingkungan, kesadaran untuk bertindak dan mengubah perilaku masih rendah.
3. Keterbatasan pengetahuan: Masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara-cara praktis untuk berkontribusi dalam perlindungan lingkungan.
4. Kurangnya platform partisipasi: Terbatasnya saluran atau media bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif perlindungan lingkungan.
5. Konflik kepentingan: Adanya benturan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan kepentingan pelestarian lingkungan jangka panjang.
6. Ketidakpercayaan terhadap sistem: Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program perlindungan lingkungan yang ada.
7. Keterbatasan akses informasi: Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkini tentang kondisi lingkungan dan kebijakan perlindungannya.
8. Kurangnya keterampilan: Masyarakat sering kali tidak memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan lingkungan yang lebih kompleks.
9. Ketidakmerataan beban tanggung jawab: Persepsi bahwa perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau perusahaan besar semata.
10. Hambatan budaya: Adanya praktik-praktik budaya atau kebiasaan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan.

Mengingat kompleksitas tantangan lingkungan yang dihadapi, partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat krusial. Masyarakat yang teredukasi dan terberdayakan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mereka dapat berperan dalam berbagai aspek, mulai dari pengawasan, pencegahan kerusakan, hingga rehabilitasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Upaya ini harus mencakup aspek edukasi, pemberdayaan, dan penyediaan platform partisipasi yang efektif. Dengan meningkatkan peran masyarakat, diharapkan dapat tercipta gerakan kolektif yang kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Studi Literature

Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Arnstein (1969) dalam artikelnya "A Ladder of Citizen Participation" mengidentifikasi tingkatan partisipasi masyarakat, dari manipulasi hingga kontrol warga. Teori ini masih relevan dalam menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam isu lingkungan. Pretty (1995) mengembangkan tipologi partisipasi yang lebih spesifik untuk konteks pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya partisipasi interaktif dan mobilisasi mandiri. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat, Kollmuss dan Agyeman (2002) dalam penelitian mereka "Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?" mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pro-lingkungan. Bamberg dan Möser (2007) melakukan meta-

analisis yang menunjukkan bahwa kesadaran akan konsekuensi, atribusi tanggung jawab, dan norma sosial adalah prediktor kuat dari perilaku pro-lingkungan.

Metode Pelaksanaan

1. Tahap Persiapan:

a. Analisis Situasi:

- 1) Melakukan survei awal untuk mengidentifikasi isu lingkungan spesifik di daerah target.
- 2) Memetakan stakeholder kunci dan potensi mitra lokal.

b. Pembentukan Tim:

- 1) Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari ahli lingkungan, fasilitator komunitas, dan relawan lokal.

c. Penyusunan Materi:

- 1) Mengembangkan modul pelatihan dan materi edukasi yang relevan dengan konteks lokal.

2. Tahap Pelaksanaan:

a. Sosialisasi Program:

- 1) Mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
- 2) Menyebarkan informasi melalui media lokal dan sosial media.

b. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran:

- 1) Menyelenggarakan seri seminar dan workshop tentang isu lingkungan lokal dan global.
- 2) Mengadakan kampanye door-to-door untuk edukasi personal.

c. Pelatihan Keterampilan:

- 1) Melakukan pelatihan praktis seperti pengelolaan sampah, pertanian organik, atau konservasi air.
- 2) Mengadakan workshop pembuatan produk ramah lingkungan.

a. Pembentukan Kelompok Lingkungan:

- 1) Memfasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di tingkat RT/RW.
- 2) Melatih anggota kelompok dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi.

e. Aksi Lingkungan Bersama:

- 1) Mengorganisir kegiatan bersih-bersih lingkungan secara rutin.
- 2) Melaksanakan program penanaman pohon atau pembuatan taman komunitas.

f. Forum Diskusi Reguler:

- 1) Menyelenggarakan pertemuan bulanan untuk membahas isu dan solusi lingkungan.

Hasil

1. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan :

85% peserta program melaporkan peningkatan pemahaman tentang isu lingkungan lokal dan global. Skor rata-rata pada tes pengetahuan lingkungan meningkat dari 60% sebelum program menjadi 80% setelah program.

2. Perubahan Perilaku.:

70% rumah tangga yang terlibat melaporkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. 60% peserta mulai melakukan pemilahan sampah di rumah. Penggunaan air per kapita menurun sebesar 15% di kalangan peserta program.

3 Partisipasi Komunitas:

Terbentuknya 10 kelompok peduli lingkungan baru di tingkat RT/RW dengan total 150 anggota aktif. Peningkatan 40% dalam kehadiran masyarakat pada pertemuan perencanaan lingkungan daerah.

4. Aksi Lingkungan:

20 aksi bersih-bersih lingkungan dilaksanakan, melibatkan total 500 relawan. 1000 pohon ditanam di area yang telah diidentifikasi sebagai rawan erosi. taman komunitas baru dibuat dan dikelola oleh masyarakat setempat.

5. Pengelolaan Sampah:

Volume sampah yang didaur ulang meningkat 30% dibandingkan sebelum program. Bank sampah baru didirikan, melayani total 300 nasabah.

6. Inovasi Lingkungan:

Proyek inovasi lingkungan skala kecil diinisiasi oleh masyarakat, termasuk sistem penampungan air hujan dan komposting komunal.

7. Kebijakan dan Regulasi:

Peraturan desa/kelurahan baru terkait perlindungan lingkungan disahkan dengan masukan aktif dari masyarakat. Alokasi anggaran desa untuk program lingkungan meningkat 25%.

Pembahasan

1. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan

Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan, dengan 85% peserta melaporkan peningkatan pemahaman. Ini sejalan dengan teori Kollmuss dan Agyeman (2002) yang menekankan pentingnya pengetahuan sebagai prasyarat untuk tindakan pro-lingkungan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kesenjangan antara pengetahuan (80% skor tes) dan perubahan perilaku (misalnya, 60% pemilahan sampah), pengetahuan saja tidak cukup untuk mengubah perilaku. Ini menegaskan kompleksitas hubungan antara pengetahuan dan tindakan dalam isu lingkungan.

2. Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku yang terlihat, seperti pengurangan penggunaan plastik dan peningkatan pemilahan sampah, menunjukkan efektivitas pendekatan Community-Based Social Marketing yang diusulkan oleh McKenzie-Mohr (2000). Pendekatan ini menekankan pentingnya mengatasi hambatan spesifik dan memanfaatkan motivator lokal untuk mendorong perubahan perilaku. Namun, tingkat adopsi yang bervariasi (70% untuk pengurangan plastik, 60% untuk pemilahan sampah) menunjukkan bahwa beberapa perilaku mungkin lebih mudah diubah daripada yang lain, mungkin karena perbedaan dalam infrastruktur pendukung atau norma sosial.

3. Partisipasi Komunitas

Pembentukan 10 kelompok peduli lingkungan baru mencerminkan keberhasilan dalam membangun modal sosial, yang menurut Pretty dan Ward (2001) adalah kunci untuk aksi lingkungan berkelanjutan berbasis masyarakat. Peningkatan 40% dalam kehadiran pada pertemuan perencanaan lingkungan menunjukkan pergeseran positif dalam governance lingkungan partisipatif, sejalan dengan rekomendasi Reed (2008) tentang pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan.

4. Aksi Lingkungan

Kegiatan bersih-bersih dan penanaman pohon yang melibatkan banyak relawan mendemonstrasikan potensi aksi kolektif dalam mengatasi masalah lingkungan lokal. Ini sejalan dengan konsep "collective efficacy" yang dibahas oleh Bandura (2000), di mana keyakinan bersama dalam kemampuan kelompok untuk membuat perubahan dapat mendorong aksi kolektif.

5. Inovasi dan Adaptasi Lokal

Munculnya 10 proyek inovasi lingkungan skala kecil menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif solusi, tetapi juga dapat menjadi inovator. Ini menegaskan pentingnya pengetahuan lokal dan kreativitas dalam mengatasi tantangan lingkungan, seperti yang diargumentasikan oleh Berkes et al. (2000) dalam konteks pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat.

Kesimpulan

Hasil program ini mendemonstrasikan potensi signifikan pendekatan berbasis masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, dan penguatan

kapasitas lokal menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif. Namun, variasi dalam hasil juga menunjukkan kompleksitas tantangan lingkungan dan kebutuhan untuk pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Untuk memaksimalkan dampak dan keberlanjutan, program semacam ini perlu terus dievaluasi dan disesuaikan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

Referensi

- Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. *Journal of Environmental Psychology*, 27(1), 14-25.
- Bandura, A. (2000). Exercise of Human Agency Through Collective Efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, 9(3), 75-78.
- Beierle, T.C., & Cayford, J. (2002). *Democracy in Practice: Public Participation in Environmental Decisions*. Resources for the Future.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262.
- Chawla, L., & Cushing, D.F. (2007). Education for strategic environmental behavior. *Environmental Education Research*, 13(4), 437-452.
- Dickinson, J.L., Shirk, J., Bonter, D., Bonney, R., Crain, R.L., Martin, J., Phillips, T., & Purcell, K. (2012). The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 10(6), 291-297.
- Wals, A.E.J., Brody, M., Dillon, J., & Stevenson, R.B. (2014). Convergence Between Science and Environmental Education. *Science*, 344(6184), 583-584.